ANALISIS HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI APPLICATION SOFTWARE OLEH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKATANI NGAMPRAH KBB

Ineu Satriani
Prodi Manajemen, Universitas Teknologi Digital
Ineu10120629@digitechuniversity.ac.id

Dicki Kusmayadi
Universitas Teknologi Digital
dickikusmayadi@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penggunaan teknologi aplikasi perangkat lunak oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan teknologi, terutama di kalangan anggota BPD yang lebih tua, serta akses internet yang tidak stabil, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas administratif. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merekomendasikan pelatihan teknologi dan perbaikan infrastruktur agar BPD dapat bekerja lebih efisien.

Kata Kunci *: Teknologi aplikasi, BPD, keterampilan teknologi, infrastruktur, pemerintah desa*

I. Pendahuluan

Di era digital saat ini, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap organisasi untuk tetap bersaing dan relevan. Teknologi digital tidak hanya mempermudah operasi sehari-hari, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, memberikan pelayanan prima, dan berinovasi secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi digital oleh sumber daya manusia, pemanfaatan media sosial secara optimal, serta analisis data yang efektif menjadi komponen vital dalam strategi organisasi untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, Gojek sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia telah berhasil mempertahankan keunggulannya di pasar ojek online melalui strategi pemasaran yang fokus pada pelanggan, kualitas layanan yang tinggi, dan inovasi berkelanjutan (Sudiantini et al., 2023).

Namun, tidak semua organisasi, terutama di sektor publik dan pemerintahan desa, mampu mengikuti perkembangan ini dengan cepat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa beberapa guru sekolah dasar di Kecamatan Maos Lor, Cilacap, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Microsoft Office dan Google Docs sebagai alat pembelajaran (Syafirullah et al., 2019). Hal serupa terjadi di Pemerintahan Desa Adipuro dan Karangduren, di mana keterampilan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah, mengakibatkan pengelolaan dokumen secara manual dan kendala dalam pelayanan kepada masyarakat (Yusnanto, 2022; Yuri Ariyanto et al., 2020). BPD Desa Sukatani Ngamprah juga menghadapi tantangan serupa, di mana banyak anggota BPD masih gagap teknologi dan belum familiar dengan aplikasi software administrasi modern, yang menghambat efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan

tugas mereka. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penggunaan teknologi aplikasi software di BPD Desa Sukatani Ngamprah dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut.

II. Kajian Teori

a. Teknologi Application Software

Wahyuddin et al. (2022) menekankan bahwa kegunaan dan integrasi merupakan dimensi kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi software, terutama di lingkungan pemerintahan desa. Dalam hal ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa software yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta kemudahan penggunaannya cenderung lebih sukses diadopsi. Selain itu, Amirulkamar et al. (2023) menambahkan bahwa kustomisasi dan kompatibilitas software dengan berbagai perangkat adalah faktor krusial yang memastikan bahwa teknologi ini dapat diterapkan secara efektif di berbagai kondisi desa yang berbeda.

b. Hambatan

Namun, meskipun teknologi ini menawarkan berbagai manfaat, penelitian juga mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam proses adopsi dan implementasinya. Pertama-tama, seperti yang dijelaskan oleh Manurung et al. (2024), keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan digital, dan resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi penghalang utama. Studi ini menunjukkan bahwa, hambatan-hambatan ini dapat mengurangi efisiensi operasional dan menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi. Sebagai tambahan, Zai et al. (2023) menyoroti bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya, yang semakin memperumit upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi di pemerintahan desa. Sementara itu, Sudirman dan Saidin (2022) menambahkan dimensi ekonomi sebagai hambatan penting lainnya, dengan mencatat bahwa keterbatasan anggaran dan ketidakmerataan akses ekonomi di desa-desa dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengadopsi teknologi application software secara efektif.

c. Solusi Dan Hambatan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, berbagai solusi telah diusulkan oleh para peneliti. Pertama, Suherry et al. (2024) menyarankan pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan sosial-budaya untuk mendukung transformasi digital yang lebih efektif. Mereka menekankan bahwa pelatihan intensif dan dukungan teknis dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital dan mengurangi resistensi terhadap perubahan di tingkat desa. Selain itu, Santoso dan Alamsyah (2023) menekankan perlunya kebijakan dan program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas digital aparatur desa, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi digital. Penelitian ini mengindikasikan bahwa, solusi yang komprehensif, yang melibatkan penyediaan teknologi serta pembangunan kapasitas dan perubahan mindset, adalah kunci dalam mengatasi hambatan yang ada. Terakhir, Andriyani et al. (2023) juga menegaskan bahwa reformasi kebijakan dan peningkatan infrastruktur merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung adopsi teknologi di pemerintahan desa. Mereka menemukan bahwa, dengan kebijakan yang mendukung inovasi digital dan penyediaan infrastruktur yang memadai, desa-desa dapat secara signifikan meningkatkan adopsi teknologi dan mengatasi berbagai hambatan yang ada, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi application software secara optimal dalam kegiatan sehari-hari.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan studi kasus berfokus pada penggunaan teknologi aplikasi perangkat lunak oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukatani Ngamprah. Studi kasus dipilih untuk memungkinkan peneliti

mengeksplorasi secara mendalam fenomena spesifik dan memahami konteks lokal serta kompleksitas dalam pengelolaan teknologi di tingkat desa.

Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan anggota BPD dan pihak terkait untuk memperoleh wawasan kualitatif yang melengkapi data kuantitatif. Observasi langsung juga digunakan untuk melihat secara nyata penerapan teknologi dalam aktivitas sehari-hari anggota BPD, mengidentifikasi kendala yang mungkin tidak terungkap melalui metode lainnya.

Pengumpulan data sekunder melibatkan studi dokumentasi yang mencakup laporan BPD, peraturan desa, dan dokumen relevan lainnya, serta analisis literatur dari penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data dalam bentuk terstruktur seperti tabel dan grafik, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hambatan dan solusi dalam penggunaan teknologi aplikasi perangkat lunak oleh anggota BPD di desa.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

a. Keterampilan Teknologi di Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Sukatani mengungkapkan bahwa keterampilan teknologi di kalangan anggota BPD sangat beragam. Adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman teknologi di antara anggota BPD, yang menjadi tantangan dalam menjalankan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan digital.

Kemampuan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi di komputer menjadi salah satu aspek yang paling menonjol. Banyak anggota BPD mengalami kesulitan dalam melakukan tugas ini, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Beberapa anggota bahkan tidak memiliki akses yang cukup terhadap perangkat yang diperlukan, sehingga menambah hambatan dalam mengembangkan keterampilan teknologi mereka.

Penguasaan Microsoft Word juga diakui sebagai keterampilan penting oleh para pihak yang diwawancarai. Microsoft Word digunakan secara luas dalam tugas-tugas administratif seperti pembuatan dokumen dan surat-menyurat. Oleh karena itu, pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan Microsoft Word dianggap sangat dibutuhkan. Dalam hal penggunaan media sosial, Facebook dan WhatsApp telah digunakan sebagai alat komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD. Meskipun penggunaan WhatsApp dianggap cukup efektif, terdapat beberapa anggota yang kurang familiar dengan teknologi ini, terutama mereka yang lebih tua. Terkait dengan instalasi program teknologi informasi, wawancara mengungkapkan bahwa banyak anggota BPD masih mengalami kesulitan. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

Para Ketua RW yang diwawancarai menekankan pentingnya dukungan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua anggota BPD dapat menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi dengan lebih mandiri. Mereka menyarankan perlunya pelatihan teknis yang lebih terstruktur, serta panduan langkah demi langkah yang dapat membantu anggota BPD dalam mengatasi tantangan teknologi.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa anggota BPD yang sudah cukup mahir dalam menggunakan teknologi, masih banyak yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Pengembangan keterampilan teknologi dan peningkatan infrastruktur dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota BPD dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi dan menjalankan tugas mereka secara efektif.

b. Hambatan

Dalam wawancara hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukatani dalam mengadopsi teknologi digital mencakup literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Ketiga faktor ini menjadi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan kinerja BPD, terutama dalam menjalankan tugas-tugas yang semakin menuntut pemahaman dan penggunaan teknologi.

Dalam aspek literasi digital, wawancara mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi menjadi hambatan terbesar bagi anggota BPD. Banyak anggota, terutama yang lebih tua, merasa kesulitan dalam mengoperasikan laptop, menggunakan aplikasi yang dibutuhkan, dan mengakses internet. Tantangan ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan keterampilan digital, seperti melalui rekrutmen anggota baru yang lebih paham teknologi, namun langkah ini belum cukup untuk mengatasi keterbatasan literasi digital di kalangan anggota BPD yang lebih senior.

Ketersediaan infrastruktur teknologi juga menjadi masalah besar. Meskipun internet sudah tersedia di desa, cakupannya masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung kegiatan BPD secara optimal. Beberapa titik masih sulit dijangkau oleh sinyal internet, sehingga menghambat akses informasi dan komunikasi yang efisien. Selain itu, kurangnya perangkat keras seperti laptop dan printer juga menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur teknologi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional BPD.

Para Ketua RW yang diwawancarai mengungkapkan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi dengan bijaksana. Mereka menyarankan bahwa pelatihan yang memadai dan dukungan teknis harus diberikan secara berkala agar anggota BPD dapat lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, pengenalan teknologi harus dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir penolakan dan meningkatkan penerimaan di kalangan anggota.

Selain itu, masalah keterbatasan infrastruktur teknologi juga menyoroti perlunya investasi yang lebih besar dalam pengembangan fasilitas teknologi di desa. Akses internet yang memadai dan ketersediaan perangkat keras yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa anggota BPD dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan. Beberapa Ketua RW menekankan pentingnya peningkatan akses internet dan prasarana kerja seperti laptop dan printer agar pekerjaan BPD dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ada kesadaran di kalangan anggota BPD dan Ketua RW tentang pentingnya adaptasi terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, masih ada keinginan untuk belajar dan beradaptasi dengan tuntutan teknologi masa kini. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan yang lebih intensif dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD Desa Sukatani dalam mengadopsi teknologi digital mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah literasi digital, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dengan langkah-langkah yang tepat, BPD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, serta lebih siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan.

c. Solusi Hambatan

Dalam konteks Desa Sukatani, berbagai hambatan dalam adopsi teknologi oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) telah menjadi sorotan utama. Hambatan-hambatan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga memperlambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dipercepat dengan

bantuan teknologi. Tiga faktor utama yang menjadi penghambat adalah literasi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan tingkat resistensi terhadap perubahan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan tingkat adopsi teknologi di BPD. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan yang memadai. Dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan, anggota BPD diharapkan dapat meningkatkan keterampilan digital mereka dan lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan teknologi digunakan secara efektif dan benar-benar mendukung kinerja BPD.

Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja di BPD. Sebagai contoh, aplikasi 6data desa memungkinkan anggota BPD untuk mengakses informasi secara real-time tanpa harus mencari atau mengolah data secara manual. Penggunaan WhatsApp juga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar anggota, yang pada akhirnya mempercepat pengambilan keputusan. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memastikan teknologi digunakan secara optimal, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan keterampilan digital.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam adopsi teknologi di BPD Desa Sukatani, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari peningkatan literasi digital, perbaikan infrastruktur teknologi, hingga pengelolaan resistensi terhadap perubahan. Upaya-upaya ini, jika dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat mendukung kinerja BPD secara lebih optimal dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pembahasan

a. Keterampilan Teknologi dan Kesenjangan Digital

Hasil penelitian menunjujan adanya kesenjangan digital yang signifikan antara anggota BPD yang lebih muda dan yang lebih tua. Generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sesuai dengan literatur yang menunjukkan bahwa usia dan pengalaman berpengaruh besar terhadap keterampilan teknologi (Prandana, 2024). Anggota yang lebih tua, yang mengalami kesulitan dengan teknologi, menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam pelatihan teknologi. Kesenjangan ini mempengaruhi efektivitas administrasi di BPD, yang sejalan dengan temuan bahwa keterampilan digital yang rendah menghambat proses kerja (Wiliyanti dkk, 2024). Penggunaan teknologi yang tidak merata dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi efisiensi operasional.

b. Hambatan Infrastruktur dan Teknologi

Hambatan infrastruktur, seperti koneksi internet yang lambat, mempengaruhi kemampuan anggota BPD untuk berkomunikasi dan mengakses informasi secara efektif. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang buruk adalah penghalang utama dalam pemanfaatan teknologi (Simamora dkk, 2024).

Masalah ini menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari strategi teknologi yang lebih luas. Tanpa perbaikan infrastruktur, pelatihan teknologi dan pendampingan teknis mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal.

c. Resistensi terhadap Perubahan dan Solusi

Resistensi terhadap perubahan, terutama di kalangan anggota yang lebih tua, memperlambat proses adaptasi teknologi. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah hambatan signifikan dalam adopsi teknologi (Aliyah & Masyaitoh, 2024). Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi resistensi ini harus mencakup pendekatan yang lebih persuasif dan dukungan yang lebih intensif.

Pelatihan dan pendampingan teknis yang telah diterapkan merupakan langkah awal yang baik, tetapi harus disertai dengan upaya untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan

dan perbaikan infrastruktur. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari pelatihan, dukungan teknis, dan peningkatan infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi hambatan dalam adopsi teknologi (Wahyuli dkk, 2024).

V. Penutup

Penerapan teknologi informasi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukatani menghadapi sejumlah hambatan signifikan, terutama yang berkaitan dengan literasi digital rendah di kalangan anggota BPD, terutama yang lebih tua, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Hambatan ini mengakibatkan kesulitan dalam mengadopsi perangkat lunak seperti Microsoft Word untuk tugas-tugas administratif, serta menghambat komunikasi dan pelaksanaan tugas secara online karena akses internet yang tidak stabil.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknologi anggota BPD, serta perbaikan infrastruktur teknologi, termasuk peningkatan stabilitas dan kecepatan internet. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, BPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, serta lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Al Hidayat, N. (2019). Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur* (Vol. 1, No. 1, pp. 101-110).

Amirulkamar, S., Mulya, S.M., Rahmatillah, P.R., Dinatuzahra, D., 2023. Dinamika Pelayanan Publik Di Indonesia dalam Perspektif Responsibility Masyarakat Melalui Media Sosial. TheJournalish: Social and Government 4, 351–361.

Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., Nugrahani, R.A.G., 2023. Technology, Law And Society. Tohar Media.

Manurung, G.J., Aswad, J., Suharmin, K.X., Indah, D.P., Darmawan, I., 2024. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Surabaya. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1.

Ningsih, E. P. (2024). Implementasi Teknologi Digital dalam Pendidikan: Manfaat dan Hambatan. *Journal EduTech*, *1*(1), 1-8.

Pradana, M. R. A. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(3), 6855-6860.

Santoso, R.B., Alamsyah, A.A., 2023. Digital Economy Working Group G20 Pada Masa Presidensi Indonesia Tahun 2022. Jurnal Perdagangan Internasional 1, 17–33.

Simamora, I. Y., Siregar, A., Nurlita, A., & Lubis, H. A. (2024). Tantangan dan Solusi Komunikasi Pembangunan pada Pendidikan di SMAN 1 Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 5962-5971.

Sudirman, F.A., Saidin, S., 2022. Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 21, 44–58.

Suherry, S., Fajar, S.B., Thomas, 2024. Manajemen Pembangunan Desa Yang Efektif. CV. AZKA PUSTAKA.

Wahyuddin, R., Sucipto, A., Susanto, T., 2022. Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality Dengan Metode Multiple Marker Pada Pengenalan Komponen Komputer. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak 3, 278–285.

Wahyuli, A. A., Riana, D., Lebang, R., & Haryaka, U. (2024). Pengembangan Peran Kepemimpinan Sekolah Untuk Mendorong Integrasi Teknologi Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani*, *4*(1), 49-54.

Wiliyanti, V., Buana, L. S. A., Haryati, H., Rusmayani, N. G. A. L., Dewi, K. A. K., & Novita, F. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA BERBASIS TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MAHASISWA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(3), 6790-6797.

Zai, L.F., Ndraha, A.B., Mendrofa, S.A., Lahagu, P., 2023. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lolofitu Moi. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi). 10, 2158–2179.